



dpmptsp
BANYUMAS

RENCANA KERJA

Pemerintah Kabupaten Banyumas

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2026 mempunyai arti strategis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan sebagai dokumen Perencanaan SKPD yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.

Purwokerto, 19 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas



KRIS SINTA INDRA KUSUMAWATI, S.STP
Pembina
NIP. 198003151999122001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika	5
BAB II. EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	355
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	366
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	661
2.6. Inovasi Perangkat Daerah	77
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	79
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	75
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	82
3.3. Program dan Kegiatan	84
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	123
BAB V. PENUTUP	15559
LAMPIRAN I	161

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra DPMPTSP Kab. Banyumas s/d Tahun 2024.....	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Banyumas Tahun 2024.....	30
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Banyumas.....	38
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 DPMPTSP Kabupaten Banyumas.....	74
Tabel 3.1	Keselarasn dengan Kebijakan Nasional	79
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahunan 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Banyumas.....	96
Tabel 4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Renstra DPMPTSP Kab. Banyumas s/d Tahun 2024.....	124

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan yang selanjutnya akan menjadi RKPD/ KUA dan PPAS, serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen serta perubahannya, Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2026 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Program dan Kegiatan dalam Renja OPD menyesuaikan dengan Revisi atas Renstra Peralihan OPD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
 24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
-

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Renja

Maksud penyusunan Renja adalah memberikan pedoman bagi program dan kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Banyumas pada Tahun 2026. Renja ini juga untuk menjabarkan tujuan sasaran dan program pembangunan Daerah yang termuat dalam dokumen Rancangan Renstra Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2025-2029.

2. Tujuan Penyusunan Renja:

Tujuan Penyusunan Renja adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam UNDANG-UNDANG dalam 25 tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;

1. Guna memberikan arah pedoman bagi DPMPTSP dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam Tahun anggaran berjalan sesuai dengan tugas fungsinya;
2. Agar perencanaan lebih berkesinambungan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memuaskan pihak-pihak yang harus dilayani.

1.4. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

pada bagian ini dijelaskan mengenai Gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang menagtur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas fungsi Perangkat Daerah dan dampaknya terhadap capaian program, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan terhadap perbedaan dengan Rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Bagian ini memuat uraian mengenai berbagai bentuk inovasi yang telah, sedang, atau direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam

rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bagian ini memuat perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan secara detail Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II. EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan

Evaluasi kinerja menyajikan dasar pengukuran kinerja yaitu target dan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja tahun berjalan ataupun realisasi dan tingkat capaian berdasarkan renstra.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tahun 2024 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tahun 2025 dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026.
Jumlah anggaran belanja pada APBD Perubahan Tahun 2026 sebesar Rp
9.911.050.000,- terdiri dari :

I. Anggaran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	: Rp	8.923.550.000,-
II. Anggaran Urusan Penanaman Modal dan PTSP	: Rp	987.500.000,-
	Jumlah : Rp	<u>9.911.050.000,-</u>

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra DPMPTSP Kab. Banyumas s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7)	10	11=(6+8+10)	1 1=(10 /4)
	[1] Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	IKM pelayanan terpadu satu pintu	nilai	91	NA	91,30	91,72	100	90,75	90,75	99,73

1				2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7)	10	11=(6+8+10)	1 1=(10 /4)	
					[2] Menngoptimalkan sistem pelayanan penanaman modal	persentase perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan	%	97	NA	96	99,83	104	98	98	101,03
2	1	0			[3] PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	%	97	NA	96	100	104	96	96	98,97
2	1	0	2.		[4] Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu sektor perekonomian kesra dan sektor Pembangunan	SK	30000	NA	20000	39826	199	10000	49.826	166,09
2	1	0	2.	00	[5] Penyediaan dan pengelolaan	Jumlah Pelaku usaha yang	Pelaku	600	NA	1900	2386	126	200	2.586	431,00

1					2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7)	10	11=(6+8+10)	1 1=(10 /4)
					Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Usaha								
2	1 8	0 4	2. 01	00 06	[5] Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	30000	NA	20050	39905	199	10000	49.905	166,3 5
2	1 8	0 4	2. 01	00 07	[5] Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat	Kegiatan	72	NA	168	238	142	24	262	363,8 9

1				2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7)	10	11=(6+8+10)	1 1=(10 /4)	
					bidang perizinan berusaha berbasis risiko	pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kot a bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Usa ha								
2	1 8	0 4	2. 01	00 08	[5] Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insent if yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kot a	Dok um en	6	NA	1	0	-	2	2	33,33
					[1] Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	Nilai Investasi Daerah	mil yar	2400	NA	1400	1694	121	2800	4.494	187,2 5

1				2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7)	10	11=(6+8+10)	1 1=(10 /4)	
					[2] Meningkatkan kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	%	78	NA	76	94	123	97	97	124,36
2	1 8	0 1			[3] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	98	NA	96	100	104	96	96	97,96
2	1 8	0 1	2. 01		[4] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	NA	3	3	100	3	6	66,67
2	1 8	0 1	2. 01	00 01	[5] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	NA	3	3	100	3	6	66,67
2	1 8	0 1	2. 01	00 07	[5] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	9	NA	3	2	67	3	5	55,56

1				2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7)	10	11=(6+8+10)	1 1=(10 /4)	
					Perangkat Daerah										
2	1	0	2.		[4] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lap ora n	12	NA	4	4	100	4	8	66,67
2	1	0	2.	00	[5] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ora ng/ Bul an	93	NA	31	128	413	31	159	170,9 7
2	1	0	2.	00	[5] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok um en	36	NA	12	12	100	12	24	66,67
2	1	0	2.		[4] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bul an	36	NA	12	12	100	12	24	66,67
2	1	0	2.	00	[5] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Pak et	45	NA	15	8	53	15	23	51,11

1				2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7)	10	11=(6+8+10)	1 1=(10 /4)	
					an Bangunan Kantor	gan Bangunan Kantor yang Disediakan									
2	1	0	2.	00	[5] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pak et	12	NA	4	4	100	4	4	33,33
2	1	0	2.	00	[5] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pak et	60	NA	20	69	345	20	89	148,3 3
2	1	0	2.	00	[5] Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pak et	36	NA	12	117	975	12	12	33,33
2	1	0	2.	00	[5] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pak et	60000	NA	20000	23306	117	20000	43.306	72,18
2	1	0	2.	00	[5] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan	Lap ora n	600	NA	200	72	36	200	272	45,33

1				2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7)	10	11=(6+8+10)	1 1=(10 /4)	
					Konsultasi SKPD										
2	1 8	0 1	2. 06	00 10	[5] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok um en	7200	NA	2400	13596	567	2400	15.996	222,1 7
2	1 8	0 1	2. 07		[4] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jen is	6	NA	2	3	150	2	5	83,33
2	1 8	0 1	2. 07	00 06	[5] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Uni t	40	NA	20	14	70	20	34	85,00
2	1 8	0 1	2. 07	00 10	[5] Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Uni t	5	NA	3	3	100	2	5	100,0 0

1				2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7)	10	11=(6+8+10)	1 1=(10 /4)	
2	1	0	2.		[4] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	6	NA	2	2	100	2	4	66,67
2	1	0	2.	00	[5] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	NA	12	12	100	12	24	66,67
2	1	0	2.	00	[5] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	117	NA	12	12	100	39	51	43,59
2	1	0	2.		[4] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jenis	12	NA	4	4	100	4	8	66,67

1					2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7)	10	11=(6+8+10)	1 1=(10 /4)
					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	1	0	2.	00	[5] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	NA	11	46	418	11	57	518,18
2	1	0	2.	00	[5] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	66	NA	66	26	39	66	92	139,39
2	1	0	2.	00	[5] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	NA	2	2	100	2	2	100,00
2	1	0	2.	00	[5] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	2	NA	2	2	100	2	2	100,00

1				2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7)	10	11=(6+8+10)	1 1=(10 /4)	
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi									
2	1 8	0 2			[3] PROGRAM PENGEMBANGA N IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	%	100	NA	50	0	-	50	50	50,00
2	1 8	0 2	2. 01		[4] Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas insentif PM	Dok um en	6	NA	2	0	-	2	2	33,33
2	1 8	0 2	2. 01	00 03	[5] Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN)	Dok um en	6	NA	2	0	-	2	2	33,33

1				2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7)	10	11=(6+8+10)	1 1=(10 /4)	
						dengan UMKM di daerah									
2	1 8	0 2	2. 02		[4] Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi dalam peta potensi yang telah dikaji	Dok um en	9	NA	3	1	33	3	4	44,44
2	1 8	0 2	2. 02	00 01	[5] Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kot a	Dok um en	2	NA	1	1	100	1	2	100,0 0
2	1 8	0 2	2. 02	00 04	[5] Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kot a	Dok um en	3	NA	1	1	100	1	2	66,67
2	1 8	0 3			[3] PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Calon Investor yang menerima promosi terfasilitasi penanaman modal yang membuat LoI	%	70	NA	50	200	400	50	50	71,43

1					2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7)	10	11=(6+8+10)	1 1=(10 /4)
2	1	0	2.		[4] Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Promosi PM yang menghasilkan LoI	Lap ora n	15	NA	5	2	40	5	7	46,67
2	1	0	2.	00	[5] Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dok um en	2	NA	1	1	100	1	2	100,0 0
2	1	0	2.	00	[5] Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kot a	Dok um en	6	NA	2	8	400	2	10	166,6 7
2	1	0			[3] PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	%	97	NA	95	212	223	95	95	97,94

1				2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7)	10	11=(6+8+10)	1 1=(10 /4)	
2	1	0	2.		[4] Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha dan Kegiatan usaha yang memperoleh fasilitasi penyelesaian masalah pembinaan dan pengawasan	Bua h	834	NA	278	1365	491	278	1.643	197,0 0
2	1	0	2.	00	[5] Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Keg iata n Usa ha	24	NA	8	23	288	8	31	129,1 7
2	1	0	2.	00	[5] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan	Pela ku Usa ha	786	NA	262	1365	521	262	1.627	207,0 0

1				2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7)	10	11=(6+8+10)	1 1=(10 /4)	
					Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko										
2	1 8	0 5	2. 01	00 06	[5] Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Keg iata n Usa ha	57	NA	19	116	611	19	135	236,8 4

1				2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7)	10	11=(6+8+10)	1 1=(10 /4)	
2	1	0			[3] PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi yang ter update secara periodik	%	100	NA	100	100	100	100	100,00	
2	1	0	2.		[4] Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik yang disajikan di website	Buah	12	NA	4	4	100	4	8	66,67
2	1	0	2.	00	[5] Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji	Dokumen	12	NA	4	4	100	4	8	66,67

1					2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7)	10	11=(6+8+10)	1 1=(10 /4)
						dan Dimanfaatkan									

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan tabel 2.1. tersebut diatas capaian kinerja Tahun 2024

1. Dari 2 tujuan telah tercapai 1 tujuan sedangkan 1 belum yaitu nilai investasi daerah tercapai karena laporan LKPM belum rilis dari BKPM serta pencatatan dengan kategori Tahunan atau perbaikan laporan di emonev dengan surat usulan perbaikan capaian indikator kinerja.
2. Dari 2 sasaran telah tercapai 1 sasaran sedangkan 1 belum tercapai yaitu Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya karena laporan mendasarkan dari laporan LKPM belum rilis dari BKPM. Pencatatan dengan kategori Tahunan atau perbaikan laporan di emonev dengan surat usulan perbaikan capaian indikator kinerja.

3. Dari 6 program telah tercapai 3 program sedangkan 3 belum tercapai yaitu Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah karena belum tercatat. Persentase Kegiatan Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Penanaman Modal karena belum ada realisasi. Persentase realisasi investasi karena laporan mendasarkan dari laporan LKPM belum rilis dari BKPM Pencatatan 2 indikator terakhir dengan kategori Tahunan atau perbaikan laporan di emonev dengan surat usulan perbaikan capaian indikator kinerja.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2. 2**Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPSTSP Kabupaten Banyumas**

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2026	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	IKM pelayanan terpadu satu pintu	-		90,5	90,75	91	91,72	93,25	91,8	IKM dapat menurun apabila rekomtek terlalu lama sehingga perijinan menjadi lama terbit
2	persentase perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan			96	96,5	97	99,83	100,61	100	
3	Nilai Investasi Daerah			800	1600	2400	2.423	N/A	5.223	Realisasi inestasi lebih tinggi dari target sehingga target tahunan di DPA/SIPD disesuaikan lagi dari 800 milyar menjadi 1.400 milyar per tahun
4	Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya			76	77	78	94	N/A	97	
5			Perda Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Perbup ditetapkan Tahun 2022, Perbup No 61 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2026	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Kabupaten Banyumas
6			Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SOP disusun dan ditetapkan Tahun 2023
7			Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1	1	1	1	N/A	1	
8			Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, dan One on One Meeting	N/A	N/A	N/A	1	N/A	2	Tahun 2024 terealisasi 1 Kegiatan Forum investasi dg HIPMI
9			Kegiatan Pameran Penanaman Modal	2	2	2	2	1	3	Realisasi Tahun 2025 berdasar Laporan Emonev TW I
10			Kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal	N/A	N/A	N/A	6	N/A	6	
11			Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	200	200	200	2386	785	2000	Realisasi Tahun 2025 berdasar Laporan Emonev TW I
12			Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	10.000	10.000	10.000	44.283	6.590	20.000	Realisasi Tahun 2025 berdasar Laporan Emonev TW I

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2026	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13			Laporan Realisasi Penanaman Modal	4	4	4	4	1	4	Laporan LKPM TW I 2025 (LKPM dilaksanakan triwulanan)
14			Pembinaan Aparatur Penanaman Modal Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
15			Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	262	262	262	1.365	35	262	Realisasi Tahun 2025 berdasar Laporan Emonev TW I
16			Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten	4	4	4	4	1	4	Laporan Data dan Informasi TW I 2025 (Laporan dilaksanakan triwulanan)
17			Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	2	2	2	21,58	N/A	5	

Berdasarkan Tabel 2.2 Dari 17 indikator tujuan dan sasaran telah tercapai kinerjanya. Untuk Tahun 2026 diproyeksikan meningkat dari realisasi Tahun 2024.

a. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

b.1. Tugas

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten .

b.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi :

- i.** Perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan, Bidang Pelayanan Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- ii.** Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan, Bidang Pelayanan Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- iii.** Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Bidang Pelayanan Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- iv.** Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- v.** Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

b.3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Koordinator Perencanaan;
- c. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan;
- e. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- f. Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- g. Jabatan Fungsional.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis DPMPTSP Kab. Banyumas pada rancangan Renstra 2025-2029 adalah Peningkatan Nilai Investasi Daerah:

1. Peningkatan Nilai Investasi Daerah

Sedangkan permasalahan berdasarkan rancangan Renstra 2025-2029 adalah :

1. Belum semua pelaku usaha melaksanakan LKPM karena kurangnya kesadaran pelaku usaha dan ketidakpahaman pelaku usaha terhadap apa yang harus di laporkan
2. Sedikitnya pelaku usaha besar yang masuk di Kab. Banyumas dikarenakan belum adanya Kawasan Industri
3. Belum ada tindak lanjut yang signifikan atas hasil pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak/kurang sesuai terhadap ketentuan yang berlaku
4. Beberapa kegiatan dengan skala usaha diatas menengah yang eksisting saat ini tidak terbaca dalam RDTR.
5. Kurangnya informasi yang disediakan oleh Kementerian terkait kendala sistem OSS
6. Beberapa Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan belum sesuai dengan aturan terbaru
7. Keluhan terhadap aplikasi sipanjimas yang sering terjadi error system, interface susah dipahami, kurang userfriendly, dan pengguna yang masih kurang memahami cara penggunaan aplikasi sehingga seringnya ada aduan terkait sistem tersebut
8. Belum diterbitkannya revisi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas tentang RTRW Kabupaten Banyumas sehingga masih mengacu kepada Perda RTRW Eksisting yang masih menjadikan dokumen Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagai salah satu syarat dalam proses perubahan status tanah pada sertifikat yang saat ini seharusnya cukup menggunakan dokumen KKPR
9. Belum adanya regulasi penyelenggaraan perizinan perumahan di tingkat daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur secara detail dan

- kebutuhan akan pelayanan perizinan perumahan secara digital/tersistem
10. Belum adanya regulasi penyelenggaraan IPTPD di tingkat daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur secara detail
 11. Adanya kebutuhan pengembangan Menu Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah (IPTPD) pada aplikasi SIPANJIMAS dan kebutuhan penanda/identitas Objek Retribusi IPTPD namun masih terkendala terkait revisi Perda
 12. Jumlah pelaku usaha yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan insentif penanaman modal masih kurang
 13. Peluang investasi yang ada di Kabupaten Banyumas masih kurang diketahui oleh masyarakat luas
 14. Data pelaku usaha besar dan UMKM sebagai dasar pelaksanaan kemitraan belum tersedia
 15. Promosi penanaman modal secara digital belum dilaksanakan secara optimal

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

DPMPTSP mempunyai 6 program dan 12 kegiatan dengan 32 sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Namun demikian akan ada perbedaan antara rancangan awal Renja OPD dikarenakan penyesuaian dengan kebutuhan lewat mekanisme pembahasan melalui musrenbang antara Pimpinan OPD, Banggar Dewan dan TAPD Kab. Banyumas. Dengan anggaran yang terbatas tersebut maka anggaran disesuaikan kembali berdasarkan telaahan bersama Bappeda. Renja Tahun 2026 sudah pada tahap Pra RKA pada bulan Juni 2026 melalui aplikasi SIPD Kemendagri.

Review terhadap rancangan awal Renja tahun 2026 telah dilakukan, hal ini berkaitan indikator kinerja serta target indikatornya serta kebutuhan dana untuk pencapaian target kinerja dengan ketersediaan dana yang ada, sehingga diperoleh hasil bahwa penetapan pagu anggaran sementara menyesuaikan dengan anggaran keseluruhan

di tingkat kabupaten serta dilakukan penyesuaian anggaran berdasarkan kemampuan daerah.

Setelah dilakukan review maka dilakukan analisis bersama antara Bappeda dengan OPD DPMPTSP dalam hal pemenuhan kebutuhan anggaran terhadap pencapaian target kinerja. Sehingga pencapaian kinerja tetap dapat optimal berdasarkan dana yang ada.

Proses review ini dilakukan dengan alasan untuk menghasilkan anggaran yang akurat dan tepat sasaran, serta diharapkan akan terjadinya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Program dan Anggaran.

Dengan review ini juga diharapkan akan menghasilkan program anggaran yang akuntabel, sehingga akan memudahkan dalam pencapaian kinerja dan pelaporannya.

Dalam penyusunan Renja OPD, DPMPTSP menggunakan pola berdasarkan kebutuhan untuk penanganan masalah pelayanan perizinan dan penanaman modal. Berdasarkan kebutuhan dapat direncanakan target kinerja Program dan kegiatan dan sub kegiatan dengan pagu anggaran Renja/RKPD indikatif induk sebesar Rp 8,911,050,000, memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 9.911.050.000,- telah diinputkan di SIPD., Dengan dasar kebutuhan anggaran dimaksud yang diajukan melalui nota dinas ke TAPD Kab. Banyumas, maka tinggal menunggu penetapan KUA PPAS oleh TAPD Kab. Banyumas dengan nilai berdasarkan analisis dan kemampuan daerah sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Perda APBD Tahun 2026.

Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan Renja DPMTSP Perubahan Tahun 2026 Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada lampiran table C-T.31.

Tabel 2. 3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banyumas

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1								9.911.050.000			Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	7,390	9.911.050.000
									8.923.550.000			IKM Mal Pelayanan Publik	91,820	8.923.550.000
												Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,550	
												Nilai SPIP Perangkat Daerah	4,210	
												Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,530	
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Banyumas	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan	98 %	8.923.550.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Banyumas	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	96,5 00 %	8.923.550.000

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	KABUPATEN/ KOTA		perangkat daerah			KABUPATEN /KOTA				
								Nilai kematangan organisasi	43	
								Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	
								Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	60%	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	20.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	100%	20.000.000
												Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	100%	
2	1	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.000.000
2	1	0	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	10.000.000

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.950.030.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.512.645.000
												Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	100%	
2	1	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	4.875.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 orang/bulan	5.428.365.000

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0	2.	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	65.030.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	74.280.000
2	1	0	2.	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	10.000.000
2	1	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	100%	10.000.000

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0	2.	00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9 Dokumen	10.000.000
2	1	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	987.754.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.036.430.500
												Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	2	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.000.000
2	1	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	4 Paket	75.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	4 Paket	73.676.500
2	1	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	25.000.000

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	382.754.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	382.754.000
2	1	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20000 Paket	65.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	65.000.000
2	1	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	405.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	455.000.000

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0	2.	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2400 Dokumen	25.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2400 Dokumen	25.000.000
2	1	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	365.183.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	100%	365.183.000
2	1	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	200.633.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	200.633.000

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0	2.	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	164.550.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	164.550.000
2	1	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2.114.993.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.343.068.000

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	299.993.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	296.368.000
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan	1.815.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.046.700.000

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Laporan	475.590.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	70%	636.223.500
												Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	150.000.000
2	1	0	2.	00	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit	185.943.500

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0	2.	00	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	174.690.000
2	1	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	125.590.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	35 Unit	125.590.000
									987.500.000			Nilai Investasi Daerah	1,453 Miliar	987.500.000
												Nilai IKM Penanaman Modal	89,800	

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
				Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Kegiatan Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	100 %	100.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Hasil Pemetaan Potensi Investasi yang dipromosikan	100%	100.000.000
2	1	0	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pemberian fasilitas insentif PM	2 Dokumen	50.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tercapainya kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal	75%	50.000.000
											Persentase tercapainya kegiatan kemitraan berusaha	50%	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0	2.	00	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	50.000.000
2	1	0	2.		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah potensi dalam peta potensi yang telah dikaji	3 Dokumen	50.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase potensi investasi kabupaten/kota yang dikaji	1 Dokumen	50.000.000
2	1	0	2.	00	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang dikaji	1 Dokumen	50.000.000

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Calon Investor yang menerima promosi terfasilitasi penanaman modal yang membuat Lol	70 %	250.000.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase calon investor yang menindaklanjuti kepeminat an investasi	50%	250.000.000
2	1	0	2.		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan Promosi PM yang menghasilkan Lol	5 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah calon investor yang menyatakan kepeminat an investasi	6 Pelaku Usaha	250.000.000
2	1	0	2.	00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	250.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	250.000.000

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
				Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase SOP perizinan berusaha dan non berusaha yang sesuai	99 %	224.500.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	97%	224.500.000
2	1	0	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen pengaduan dan konsultasi Jumlah perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu sektor perekonomian kesra dan sektor Pembangunan	12 Dokumen 20000 Surat Keputusan	224.500.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Perizinan satu pintu yang diterbitkan	99%	224.500.000

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	1	0	2.	00	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1900 Pelaku Usaha	20.000.000	0	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 Kegiatan Usaha	20.000.000

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0	2.	00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20050 Pelaku Usaha	132.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20100 Pelaku Usaha	132.000.000

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0	2.	00	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	168 Kegiatan Usaha	52.500.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten /Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200 Dokumen	52.500.000

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0	2.	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Pelaku Usaha	20.000.000
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase realisasi investasi	97 %	393.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Proyek Penanaman Modal yang Memiliki Nilai Investasi dari LKPM yang disetujui	23%	393.000.000

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0	2.		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku usaha dan Kegiatan usaha yang memperoleh fasilitasi penyelesaian masalah pembinaan dan pengawasan	278 Buah	393.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaku Usaha kecil, menengah dan besar berijin yang memperoleh fasilitasi pelaksanaan penanaman modal	21%	393.000.000
2	1	0	2.	00	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	8 Kegiatan Usaha.	50.000.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	10 Kegiatan Usaha	50.000.000

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
							Kegiatan Usahanya					Kegiatan Usahanya		
2	1	0	2.	00	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	262 Pelaku Usaha	288.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan	265 Pelaku usaha	288.000.000

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	1	0	2.	00	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	19 Kegiatan Usaha	55.000.000	0	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha	55.000.000

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
				Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Data dan Informasi yang ter update secara periodik	100 %	20.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Data dan Informasi yang ter update secara periodik	100%	20.000.000
2	1	0	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik yang disajikan di website	4 Buah	20.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi yang disajikan di website	100%	20.000.000

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	0	2.	00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	20.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5 Dokumen	20.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota adalah sbb :

1. Penjelasan tentang proses usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan diperoleh :

Penelaahan atas usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan adalah usulan masyarakat melalui musrenbang tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten yaitu berupa skala prioritas dari tiap tahapan musrenbang. Berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan yang digawangi oleh Bappedalitbang kab. Banyumas untuk DPMPTSP tidak ada usulan program kegiatan melalui mekanisme musrenbang dari masyarakat, tetapi dilakukan melalui Forum OPD Gabungan yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2025, namun untuk DPMPTSP tidak ada masukan dari masyarakat, karena pemapar diwakili oleh 2 OPD lain dari 6 OPD. Sehingga masukan berasal dari perangkat daerah sendiri berdasarkan urgensi dan kebutuhan perangkat daerah.

Anggaran juga mengakomodir Pengarus Utamaan Gender, Kabupaten Layak Anak serta pelayanan untuk disabilitas. Program dan kegiatan yang mendukung hal tersebut yaitu :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Yaitu untuk sarana berupa komponen listrik/penerangan dan peralatan rumah tangga ruang laktasi , bermain anak dan disabilitas

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Yaitu untuk mendukung sarana berupa penyediaan Listrik, komunikasi dan air.

3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Yaitu untuk pemeliharaan sarana dan peralatan ruang laktasi, bermain anak, dan disabilitas

4. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Yaitu pelayanan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan tanpa membedakan gender baik untuk pengusaha/investor serta masyarakat. Layanan tersebut berupa perizinan dan non perizinan, survey kepuasan masyarakat (pengunjung), serta konsultasi dan pengaduan masyarakat.

5. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Yaitu pelayanan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan tanpa membedakan gender baik untuk pelaku usaha/investor serta masyarakat. Layanan tersebut berupa perizinan dan non perizinan, survey kepuasan masyarakat (pengunjung), serta konsultasi dan pengaduan masyarakat.

Sedangkan Prioritas kegiatan dan pelayanan penanaman modal adalah sebagai berikut

1. Terpenuhinya sarpras MPP untuk membenahan gerai-gerai pelayanan di MPP yang bagus dan nyaman untuk pelayanan kepada pengunjung mall diantaranya pemenuhan sarpras yg mumpuni diantaranya peralatan penunjang pelayanan yang diperbarui serta akses internet yang cepat dan stabil, Perbaikan Gedung dan lingkungan Gedung, sehingga menimbulkan kenyamanan dan akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sehingga anggaran anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarpras sangat dipentingkan.
2. Pelayanan perizinan keliling berupa legalisasi UMKM untuk mendapatkan NIB yg dilakukan jemput bola ke lokasi tertentu, desa, kecamatan atau organisasi lainnya. Sehingga anggaran dialokasikan untk membiayai kegiatan perizinan keliling ini. Untuk legalisasi

perizinan karena kegiatan ini telah cukup masiv menggaet para pelaku usaha mikro kecil di wilayah Kab. Banyumas, sehingga s.d. Tahun 2024 telah tercapai 77.373 ribu kegiatan usaha yang memperoleh perizinan (86,91%) yang dicatat dari sejak Tahun 2021 yaitu sejak adanya pelayanan MPP berupa integrasi OSS menjadi OSS RBA, yaitu pencatatan kembali perizinan OSS menjadi OSS RBA sejak adanya MPP di Tahun 2019. Sedangkan jumlah pelaku usaha/keg usaha mikro kecil sejumlah 90.022 ribu pelaku usaha/kegiatan usaha yang ber NIB di Tahun 2022 (sumber data Dinakerkop UKM Kab. Banyumas). Kegiatan legalisasi perizinan mulai menurun karena Sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil telah memperoleh perizinan.

3. Pelayanan Bersama gerai-gerai yg memiliki layanan keliling ke Kec. Terjauh atau dengan akses yang jauh seperti Samsat, KPP Pratama, Bank Jateng, BPJS dll diaplikasikan ke dalam MPP keliling.
4. Diprioritaskan anggaran untuk promosi investasi berupa promosi offline meliputi promosi yang diselenggarakan oleh APKASI (Asosiasi Kepala Daerah Se Indonesia)di Jakarta, promosi CJIBF (Central Java Investment Bussiness Forum) di Semarang, Promosi Forum Investasi dan one on one meeting dengan mengikutsertakan para pelaku usaha untuk tertarik dalam menanamkan atau mengembangkan investasinya pada berbagai sektor. Promosi Online melalui media social, website SiGAIB, Baliho. Promosi melalui media cetak seperti surat kabar ataupun majalah, promosi melalui media online melalui televisi dan radio.

Tabel mengenai Rancangan Akhir Renja/RKPD dan analisis kebutuhannya diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 DPMPTSP Kabupaten Banyumas

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Anggaran	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5		-6
1	Pemeliharaan MPP Kabupaten Banyumas (Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	MPP Banyumas	Relokasi Gerai Lapak Aduan Banyumas dan gudang di MPP	1 gerai dan 1 gudang	Rp 65.000.000	Untuk penataan ruangan MP, karena kebutuhan ruang gerai yang bertambah
MPP Banyumas		Penataan Gerai Pengadilan di MPP	1 gerai	Rp 22.710.000	Penataan kembali gerai pengadilan	
MPP Banyumas		Pemeliharaan Gedung MPP)Paving, Selasar, Kebocoran atap gedung MPP)	1 gedung	Rp 200.000.000	Pemeliharaan Gedung MPP karena adanya kerusakan	
2	Pemeliharaan jaringan internet DPMPTSP dan MPP (Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya)	MPP Banyumas	Pemeliharaan jaringan internet	1 jaringan	Rp 6.000.000	Pemeliharaan jaringan internet yang sering troubel dan lambat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Anggaran	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5		-6
3	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung (Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	MPP Banyumas	Pengadaan meja dan kursi	10 set	Rp 60.000.000	Untuk para pegawai fungsional yang bertambah
		MPP Banyumas	Pengadaan kursi sofa dan barstool	1 kursi sofa dan barstool	Rp 15.000.000	Untuk menambah layanan di MPP
		MPP Banyumas	pengadaan komputer	40 Unit	Rp 600.000.000	Unruk mengganti secara bertahap unit komputer pelayanan perijinan yang sudah lambat/rusak dari pengadaan tahun 2018
		MPP Banyumas	Pengadaan layar monitor	2 unit	Rp 30.000.000	Untuk meningkatkan layanan karena kerusakan monitor antrian
		MPP Banyumas	Pengadaan meja rapat	2 unit	Rp 20.000.000	Kekurangan meja rapat pd ruang rapat di MPP

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Anggaran	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5		-6
		MPP Banyumas	Pengadaan kursi rapat	28 unit	Rp 42.000.000	Untuk memenuhi kebutuhan kursi rapat di MPP
		MPP Banyumas	Pengadaan kursi pimpinan rapat	2 unit	Rp 5.000.000	Untuk memenuhi kebutuhan kursi pimpinan rapat di MPP
	Jumlah				Rp 1.065.710.000	

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah : DPMPSTSP Kab. Banyumas mengampu urusan penanaman modal, sehingga memperhatikan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yaitu :
 - a. Peningkatan investasi daerah
 - b. Peningkatan Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan terpadu satu pintu

Berdasarkan Tabel T-C 32 maka kebutuhan yang menjadi sangat urgen adalah untuk MPP berupa pemeliharaan Gedung kantor berupa perbaikan kerusakan atap, halaman Gedung serta penataan kembali gerai-gerai yang ada di di MPP, pengadaan meja dan kursi kerja, Pemeliharaan jaringan internet serta pengadaan peralatan dan mesin MPP berupa komputer, layar monitor pendaftaran, serta meja kursi rapat. Kebutuhan anggaran 1,065 milyar rupiah yang diusulkan sebelumnya melalui usulan KUA PPAS anggaran perubahahn Tahun 2025. Namun berdasarkan iformasi terakhir bahwa kemampuan keuangan daerah untuk anggaran perubahan sangat minim sehingga dimungkinkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan MPP dan peralatan sangat kecil bahkan tidak ada di perubahan anggaran. Sehingga dalam hal ini diusulkan kembali di Tahun 2026 melalui kebijakan TAPD ataupun Pokir Dewan.

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Berbagai bentuk inovasi yang telah, sedang, atau direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Inovasi yang meliputi aspek kebijakan, tata kelola, pelayanan, sistem informasi, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Bentuk-bentuk inovasi yang dimiliki DPMPSTSP Kab. Banyumas adalah sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. LAKONNE TERPANA

- a. Nama Inovasi : LAKONNE TERPANA (Layanan Konsultasi Secara Online dengan Media Zoom Meeting Tentang Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan)
- b. Tujuan dan Latar Belakang Inovasi : Dibutuhkan media konsultasi yang dapat diakses pelaku tanpa batas ruang dan waktu
- c. Bentuk dan ruang lingkup inovasi : Layanan Konsultasi secara online
- d. Tahun mulai Pelaksanaan : 2023
- e. Hasil /Impact yang telah dicapai : memberikan kemudahan akses konsultasi secara online kepada pelaku usaha yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja melalui media Zoom MeetingRencana
- f. Rencana Pengembangan Inovasi :-

2. DOLANMAS

- a. Nama Inovasi : DOLANMAS (Layanan Pendaftaran Secara Online Perizinan Banyumas)
- b. Tujuan dan Latar Belakang: Dibutuhkan media pendaftaran secara online MPP Banyumas yang dapat diakses pelaku tanpa batas ruang dan waktu
- c. Bentuk dan ruang lingkup inovasi : Pendaftaran secara online
- d. Tahun mulai Pelaksanaan : 2024
- e. Hasil /Impact yang telah dicapai : memberikan kemudahan akses pendaftaran secara online kepada pelaku usaha yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.
- f. Rencana Pengembangan Inovasi : -

3. PENJOL PEDAS

- a. Nama Inovasi : PENJOL PEDAS (Pendampingan Perijinan Online Penyandang Disabilitas)

- b. Tujuan dan Latar Belakang: Dibutuhkan pendampingan kepada para penyandang disabilitas dalam melakukan perijinan online
 - c. Bentuk dan Ruang Lingkup : Pendampingan perijinan berusaha kepa para penyandang disabilitas
 - d. Tahun mulai Pelaksanaan : 2024
 - e. Hasil /Impact yang telah dicapai : memberikan kemudahan pendaftaran perijinan online kepada penyandang disabilitas.
 - f. Rencana Pengembangan Inovasi : -
4. MPP Keliling
- a. Nama: MPP Keliling (Mal: Pelayanan Publik Keliling)
 - b. Tujuan dan Latar Belakang: Dibutuhkan sarana pelayanan keliling yang dapat diakses oleh masyarakat pada wilayah kecamatan terjauh atau sulit akses)
 - c. Bentuk dan Ruang Lingkup : Pelayanan Perijinan dan non perijinan keliling kepada masyarakat Banyumas terjauh dan sulit akses, yaitu pada 5 Kecamatan
 - d. Tahun mulai pelaksanaan : 2024
 - e. Hasil / Impact yang telah dicapai : memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses layanan perijinan dan non perijinan
 - f. Rencana Pengembangan Inovasi : -
5. JOKIS
- a. Nama Inovasi : JOKIS (Pojok Informasi)
 - b. Tujuan dan Latar Belakang: Dibutuhkan layanan konsultasi dan Mal Pelayanan untuk masyarakat
 - c. Bentuk dan Ruang Lingkup : Pelayanan informasi pelayanan gerai-gerai di MPP
 - d. Tahun mulai pelaksanaan : 2022
 - e. Hasil / Impact yang telah dicapai : memberikan kemudahan informasi pelayanan perijinan dan non perijinan
 - f. Pengembangan Inovasi : Layanan konsultasi secara online
6. GELAS UMI KECE MAS

- a. Nama Inovasi : GELAS UMI KECE MAS (Legalisasi Usaha Mikro Kecil Banyumas)
 - b. Tujuan dan Latar Belakang: Untuk memberikan kemudahan pelayanan perijinan berusaha langsung kepada masyarakat, yaitu untuk usaha-usaha mikro dan kecil
 - c. Bentuk dan Ruang Lingkup : Pelayanan legalisasi perijinan usaha mikro dan kecil
 - d. Tahun mulai pelaksanaan : 2021
 - e. Hasil / Impact yang telah dicapai : memberikan kemudahan pelayanan perijinan berusaha langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil
 - f. Rencana Pengembangan Inovasi : -
7. EMPING LAKU MAS
- a. Nama Inovasi : EMPING LAKU MAS (Pendampingan Pelaku Usaha Dalam Percepatan Investasi di Kabupaten Banyumas)
 - b. Tujuan dan Latar Belakang: Untuk memberikan kemudahan pelayanan perijinan berusaha bagi pelaku usaha yang akan menanamkan modal pada usaha yang baru
 - c. Bentuk dan Ruang Lingkup : Mempermudah dan mempercepat dalam melakukan pendampingan pada pelaku usaha untuk menanamkan modal di Kabupaten Banyumas
 - d. Tahun mulai pelaksanaan : 2024
 - e. Hasil / Impact yang telah dicapai : memberikan kemudahan dalam proses perizinan
 - f. Pengembangan Inovasi : -

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan daerah tahun 2026 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2026 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Selain itu prioritas

pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

RKP Tahun 2026 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMN 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 didasarkan atas Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2025-2029, yaitu “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi pembangunan/ Asta Cita, yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional. Prioritas Nasional tersebut antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 disusun pentahapan fokus kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan pada tahun 2026 fokus diarahkan pada kebijakan “Meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional”. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kebijakan tersebut antara lain:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (large scale food fortification/LSFF);
8. pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste).

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 juga diarahkan untuk “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah” dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah yaitu:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis.
2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan.
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Rencana pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2026 disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Adapun visi yang ditetapkan adalah: *“Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.”* Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diarahkan untuk *“Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif”*. Secara keseluruhan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diprioritaskan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu secara inklusif
- b. Meningkatkan budaya literasi, pengelolaan olahraga dan kebudayaan Banyumas untuk penguatan Karakter Sumber Daya Manusia yang unggul
- c. Meningkatkan pembangunan keluarga yang memperhatikan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, kesetaraan gender, pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat secara inklusif, serta peningkatan peran aktif pemuda

- d. Meningkatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pelaku ekonomi
- e. Penguatan Implementasi regulasi yang hijau dan adaptif
- f. Meningkatkan pengembangan produk potensial dan produk unggulan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung
- g. Meningkatkan penanganan kemiskinan dan pelayanan perlindungan sosial secara terintegrasi
- h. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan penurunan pengangguran
- i. Memperkuat Ketahanan Pangan Lokal dengan peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta pengembangan pangan lokal
- j. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan konektivitas serta instrumen pendukung yang memadai dan berkelanjutan
- k. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi mendukung Reformasi Birokrasi
- l. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah secara berkelanjutan

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 3. 1

Keselarasan dengan Kebijakan Nasional

NO PK	Prioritas Kabupaten	NO PP	Prioritas Provinsi	NO PN	Prioritas Nasional
PK5	Penguatan Implementasi regulasi yang hijau dan adaptif	PP1	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan	PN5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk

NO PK	Prioritas Kabupaten	NO PP	Prioritas Provinsi	NO PN	Prioritas Nasional
			berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas		meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
PK6	Meningkatkan pengembangan produk potensial dan produk unggulan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung	PP1	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	PN5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
PK8	Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan penurunan pengangguran	PP1	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	PN3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

NO PK	Prioritas Kabupaten	NO PP	Prioritas Provinsi	NO PN	Prioritas Nasional
PK11	Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi mendukung Reformasi Birokrasi	PP4	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	PN7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas maka pelayanan DPMPTSP Kab. Banyumas yaitu pada urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah terkait prioritas Nasional sbb :

- a. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan prioritas kabupaten Penguatan Implementasi regulasi yang hijau dan adaptif yaitu untuk peningkatan investasi hijau dan berkelanjutan serta Meningkatkan pengembangan produk potensial dan produk unggulan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung yaitu untuk meningkatkan investasi berbasis hilirisasi produk potensial dan produk unggulan lokal.
- b. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Dengan prioritas kabupaten Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan penurunan pengangguran yaitu berupa meningkatkan investasi yang dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat

menampung tenaga kerja produktif serta mengurangi pengangguran.

- c. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dengan prioritas kabupaten Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi mendukung Reformasi Birokrasi berupa pelayanan birokrasi yang lebih sederhana dan cepat dalam rangka pelayanan perijinan dan non perijinan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran dilakukan untuk merespons isu-isu strategis yang telah diidentifikasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bertanggung jawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

Rencana pembangunan disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Adapun visi yang ditetapkan adalah: *“Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.”* Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan sejahtera;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diarahkan untuk *“Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif”*.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyumas Tahun 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya nilai investasi daerah	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan investasi dan penanaman modal 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Isu penting penyelenggaraan tugas OPD adalah Peningkatan Investasi Dserah.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja OPD adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam UNDANG-UNDANG dalam 25 tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai berikut :

1. Guna memberikan arah pedoman bagi DPMPTSP dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam Tahun anggaran berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Agar perencanaan lebih berkesinambungan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memuaskan pihak-pihak yang harus dilayani.

Sedangkan sasaran Renja OPD adalah tercapainya target kinerja pada DPMPTSP melalui pelayanan yang prima dan adaptif serta dengan birokrasi yang sederhana, cepat serta aspiratif.

Tujuan dan sasaran renja OPD adalah untuk menopang tujuan dan sasaran OPD yaitu :

Tujuan OPD adalah :

1. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

Sasaran OPD adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Investasi dan Pelayanan Penanaman Modal
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, yaitu :

- a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

Rumusan Program dan kegiatan OPD adalah untuk menopang visi dan misi kepala daerah yaitu :

Visi : Menjadikan Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera

Misi :

3. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah

4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berdaya saing
Berdasarkan visi, maka dengan investasi yang meningkat maka Kabupaten Banyumas akan lebih Prouktif.

Berdasarkan misi, maka dengan investasi yang meningkat akan mendorong daya saing daerah.

Kemudian dengan pelayanan perijinan yang sederhana, cepat dan adaptif akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing.

b) Pencapaian SDGs,

SDGs adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), sebuah rencana aksi global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia, untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Berikut adalah 17 Tujuan SDGs:

1. Tanpa Kemiskinan:

Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua tempat.

2. Tanpa Kelaparan:

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera:

Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan seluruh penduduk di segala usia.

4. Pendidikan Berkualitas:

Memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

5. Kesetaraan Gender:
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak:
Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Energi Bersih dan Terjangkau:
Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur:
Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Berbagai Bentuk Ketimpangan Dikurangi:
Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan:
Membuat perkotaan dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab:
Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Penanganan Perubahan Iklim:
Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Ekosistem Lautan:
Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Ekosistem Daratan:

Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, memerangi desertifikasi, dan menghambat serta membalikkan degradasi lahan serta menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.

16. Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga yang Kuat:

Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua, dan membangun lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan:

Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan SDGs di Indonesia didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Terkait pelaksanaan urusan penanaman modal, DPMPTSP Kab. Banyumas ikut andil dalam pencapaian SDGs

1. Tanpa Kemiskinan

Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua tempat

5. Kesetaraan Gender:

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Yaitu mencapai kesetaraan gender dalam melakukan kegiatan usaha.

7. Energi Bersih dan Terjangkau:

Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Dengan menerapkan investasi hijau akan menopang pada energi bersih terbarukan dan terjangkau oleh masyarakat.

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dengan investasi penduduk produktif akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan pertumbuhan investasi yang bagus akan menopang pertumbuhan ekonomi.

9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur:

Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Dengan investasi yang focus kepada hilirisasi produk khusus akan mendorong industri pengolahan berkembang serta akan mendorong inovasi dalam proses hilirisasi.

c) Pengentasan kemiskinan,

Pengaruh investasi daerah secara tidak langsung akan memperluas kesempatan kerja terutama investasi padat karya, sehingga akan ikut berperan dalam penanggulangan kemiskinan.

d) Pencapaian NSPK dan SPM,

d.1) NSPK adalah singkatan dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. Istilah ini mengacu pada seperangkat aturan, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan untuk mengatur berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. NSPK bertujuan untuk memastikan keseragaman, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Penjelasan lebih rinci:

Norma: Merupakan ketentuan dasar yang menjadi acuan dalam bertindak.

Standar: Menetapkan ukuran atau kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu pekerjaan atau kegiatan.

Prosedur: Merupakan langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan.

Kriteria: Merupakan ukuran atau patokan untuk menilai suatu hasil atau capaian.

Penerapan NSPK:

NSPK diterapkan dalam berbagai bidang pemerintahan, seperti:

- Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah)
- Kearsipan
- Keteknikan lingkungan
- Manajemen jalan dan jembatan (misalnya, pedoman teknis, prosedur teknis)

Dan lain sebagainya.

NSPK berperan penting dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan profesional. Dengan adanya NSPK, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan akuntabel.

Terkait dengan hal ini NSPK diterapkan pada pelayanan Perijinan yaitu berupa SP dan SOP pelayanan perijinan, sehingga pelayanan perijinan akan lebih bersih, efektif, sederhana, cepat dan professional.

d.2) SPM Penanaman Modal, atau Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar di bidang penanaman modal yang berhak diperoleh setiap pelaku usaha secara minimal. Ini adalah bagian dari pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar pelaku usaha di bidang investasi.

Lebih detail tentang SPM Penanaman Modal:

Tujuan:

Memberikan standar pelayanan yang jelas dan terukur dalam proses perizinan, informasi, dan fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha yang berinvestasi.

Ruang Lingkup:

Meliputi pelayanan dasar seperti perizinan berusaha, informasi penanaman modal, fasilitas investasi, dan pengawasan kegiatan penanaman modal.

Penyelenggara:

Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang penanaman modal sesuai dengan SPM yang ditetapkan.

Indikator Kinerja:

Setiap jenis pelayanan dasar memiliki indikator kinerja dan target yang harus dicapai oleh penyelenggara pelayanan.

Manfaat:

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penanaman modal.

Mendorong iklim investasi yang kondusif.

Meningkatkan kepastian hukum dan transparansi bagi pelaku usaha.

Mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan investasinya.

Dengan adanya SPM Penanaman Modal, diharapkan pelayanan kepada pelaku usaha menjadi lebih baik, efisien, dan efektif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.

Terkait dengan SPM penanaman modal, maka DPMPTSP Kabupaten Banyumas telah dan sedang melaksanakan norma-norma SPM tersebut diatas dengan berbagai inovasi dan penyederhanaan birokrasi perijinan sehingga pelayanan kepada pelaku usaha menjadi lebih baik,

efisien, dan efektif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.

- e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dengan mengacu pada naskah akademik yang telah disusun yaitu terkait potensi unggulan daerah (PUD) serta potensi lokal lainnya , sehingga investasi akan diarahkan pada PUD dan potensi lokal lainnya serta memperhatikan kebijakan ekonomi hijau serta hilirasi produk agro yang dapat memberikan nilai tambah.
- f) Pengembangan daerah terisolir,
Pengembangan daerah terisolir dengan melakukan pelayanan perijinan dan non perijinan melalui MPP Keliling pada 5 kecamatan terjauh dan sulit akses.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Jumlah program Renja Tahun 2026 meliputi 6 program 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan.

Sifat penyebaran lokasi program :

- 1) Program Pelayanan Penanaman Modal

Penyebaran lokasi program pada desa atau kecamatan atau pasar atau keramaian seperti di GOR Satria di Kab. Banyumas. Untuk legalisasi perijinan mikro dan kecil. Untuk legalisasi usaha / perijinan usaha kepada kelompok masyarakat dilakukan pendampingan untuk para penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat lainnya dengan bersurat. Untuk MPP Keliling persebaran lokasi di 5 Kecamatan terjauh dan sulit akses yaitu di Kec. Pekuncen, Kec. Gumelar Kec. Lumbir, Kec. Purwojati, Kec. Sumpiuh.

- 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Penyebaran lokasi program pada desa atau kecamatan di Kab. Banyumas yang mempunyai potensi khas ataupun potensi unggulan. Kegiatan dengan survey potensi sebagai bahan

kajian peta potensi investasi dan peluang usaha. Untuk kemitraan usaha penyebaran lokasi pada pelaku usaha/kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah di Kab. Banyumas yang akan bermitra dengan usaha besar yaitu dengan modal diatas 10 milyar rupiah. Proses kemitraan dijumpai melalui aplikasi OSS RBA.

3) Program Promosi Penanaman Modal

Penyebaran lokasi program pada tingkat nasional dan propinsi ataupun di Kabupaten Banyumas. Untuk tingkat Nasional promosi investasi di Jakarta dengan penyelenggaraan APKASI (Asosiasi Pimpinan/ Kepala Daerah se Indonesia). Untuk tingkat propinsi berupa kegiatan promosi melalui CJIBF (Central Java Investment Bussines Forum) di Semarang atau di Kabupaten/Kota lingkup Propinsi Jateng. Untuk tingkat Kabupaten Banyumas penyebaran lokasi kegiatan di Kab. Banyumas melalui Bussines/Inestmen Forum, one on one meeting dengan pelaku usaha/calon investor, Promosi melalui 5 media cetak dan 5 media elektronik, pemasangan baliho pada titik-titik tertentu di Kab. Banyumas.

4) Program Pengendalian Penanaman Modal

Penyebaran lokasi program pengendalian penanaman modal pada lingkup Kab. Banyumas yaitu untuk penyelesaian permasalahan realisasi investasi kepada para pelaku usaha yang telah berijin. Kegiatan ini dapat dilakukan secara langsung ke lokasi ataupun mengumpulkan para pelaku usaha berijin untuk dilakukan forum penyelesain permasalahan ataupun kendala realisasi penanaman modal. Penyebaran kegiatan Bimtek LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dilakukan dengan mengundang para pelaku usaha kecil sampai besar untuk melaporkan LKPM melalui OSS RBA. Kegiatan juga dapat dilakukan bimbingan secara langsung per pelaku usaha di kantor. Penyebaran

lokasi pengawasan dilakukan pada lokasi kegiatan usaha yang tersebar di Kab. Banyumas berupa pengawasan rutin kepada para pelaku usaha ataupun pengawasan berdasarkan pengaduan masyarakat.

5) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Penyebaran lokasi program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dilaksanakan pada lingkup Kab. Banyumas, namun tercenter di Kantor DPMPTSP. Kegiatan yang dilakukan adalah pengolahan data dan informasi perijinan dan non perijinan secara elektronik bersumber dari OSS RBA (aplikasi pusat) ataupun Sipanjimas (aplikasi Kabupaten) ataupun Susanmas (Survey Kepuasan Masyarakat) lokasi surey kepuasan masyarakat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan di Mal Pelayanan Publik. Sedangkan Pengolahan data meliputi 23 sektor kegiatan usaha yang ada di OSS RBA.

6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Penyebaran lokasi program penunjang urusan pemerintahan ada di Kantor DPMPTSP dan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas. Program penunjang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan, pengadaan, dan gaji PNS, jasa non PNS. Kebutuhan pendanaan Sebagian besar untuk Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif Tahun 2026 sebesar Rp 9.911.050.000 berasal dari DAU untuk Gaji dan tunjangan serta PAD untuk Non Gaji dan Tunjangan.

Kebutuhan pendanaan Gaji dan tunjangan ASN untuk Tahun 2026 Sebesar Rp 5.428.365.000 (DAU) Untuk urusan penanaman modal Rp 987.500.000,- (PAD) Selebihnya untuk penunjang urusan selain Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 3.495.185.000,- (PAD).

c. Penjelasan atas rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah rancangan awal Rp 4.950.030.000,- menjadi Rp 5.512.645.000,-. Perubahan ini terinci sbb :

- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN rancangan awal Rp 4.875.000.000 menjadi Rp 5.428.365.000, yaitu dikarenakan untuk mengcover kebutuhan Gaji dan Tunjangan Tenaga Jasa menjadi PPPK serta kekurangan pembayaran tunjangan fungsional JFT PP dan JFT PKPM. Hal inipun berdasarkan berdasarkan penghitungan subag keuangan anggaran belum terpenuhi untuk Gaji dan Tunjangan karen dalam perhitungan awal belum dialokasikan untuk pembayaran tenaga PPPK baru yang SK nya diproyeksikan Oktober 2024. Kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN berkisar Rp 2 milyar rupiah.
- Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN rancangan awal Rp 65.030.000,- menjadi Rp 74.280.000,- karena penyesuaian SSH pengelola keuangan dan barang.

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah rancangan awal Rp 987.754.000,- menjadi Rp 1.036.430.500,-. Perubahan ini terinci sbb :

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor rancangan awal Rp 75.000.000,- menjadi Rp 73.676.500, yaitu dikarenakan penyesuaian terhadap kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD rancangan awal Rp 405.000.000,- menjadi Rp 455.000.000,- karena rencana untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM pelayanan.

- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah rancangan awal Rp 2.114.993.000,- menjadi Rp 1.343.068.000,-. Perubahan ini terinci sbb :
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik rancangan awal Rp 299.993.000,- menjadi Rp 296.368.000, yaitu dikarenakan penghitungan kembali terhadap beban listrik, airminum dan jasa komunikasi.
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor rancangan awal Rp 1.815.000.000,- menjadi Rp 1.046.700.000,- karena Pengurangan pada jasa tenaga non ASN yang telah beralih menjadi PPPK.
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah rancangan awal Rp 475.590.000,- menjadi Rp 636.223.500,-. Perubahan ini terinci sbb :
- Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya rancangan awal Rp 100.000.000,- menjadi Rp 185.943.500,- yaitu untuk pemeliharaan Gedung kantor MPP yang sangat urgen untuk perbaikan, sehingga pelayanan perijinan dan non perijinan dapat memberi kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat dan para pelaku usaha.
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya rancangan awal Rp 100.000.000,- menjadi Rp 174.690.000,- yaitu untuk penataan gerai-gerai yang ada di MPP disebabkan bertambahnya gerai layanan serta untuk perbaikan gerai-gerai yang ada di MPP.

d. Tabel rencana program dan kegiatan

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T- C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Banyumas

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	18					Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	%		7,390	9.911.050.000			11,090	10.111.900.000
						IKM Mal Pelayanan Publik	Angka		91,820	8.923.550.000			91,920	9.104.600.000
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka		87,550				87,600	
						Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka		4,210				4,220	
						Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka		3,530				3,550	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Kab. Banyumas	96,500	8.923.550.000	DAU-PAD		96,700	9.104.600.000
						Nilai kematangan organisasi	Angka		43				43	
						Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%		100				100	
						Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah	%		60				60	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						bernilai sedang - sangat tinggi								
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%		100	20.000.000			100	20.000.000
						Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%		100				100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	18	01	2.01	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		5	10.000.000			5	10.000.000
2	18	01	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		11	10.000.000			11	10.000.000
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		100	5.512.645.000			100	6.024.469.500
						Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban	%		100				100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)								
2	18	01	2.0201	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		58	5.428.365.000			58	5.940.189.500
2	18	01	2.0022	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Angka		4	74.280.000			4	74.280.000
2	18	01	2.0024	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	Dokumen		5	10.000.000			5	10.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						an Akuntansi SKPD								
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	%		100	10.000.000			100	10.000.000
2	18	01	2.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	Dokumen		9	10.000.000			9	10.000.000
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administr	%		100	1.036.430.500			100	926.430.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						asi Umum Perangkat Daerah								
						Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka		2				2	
2	18	01	2.060	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		6	10.000.000			6	10.000.000
2	18	01	2.062	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket		4	73.676.500			4	73.676.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Disediakan								
2	18	01	2.060	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4	25.000.000			4	25.000.000
2	18	01	2.060	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12	382.754.000			12	382.754.000
2	18	01	2.060	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12	65.000.000			12	35.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	18	01	2.069	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		100	455.000.000			84	375.000.000
2	18	01	2.0610	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		2400	25.000.000			2400	25.000.000
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan	%		100	365.183.000			100	175.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						n barang miik daerah (RKBMD)								
2	18	01	2.07	005	Pengadaan Mebelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		N/A	0			10	25.000.000
2	18	01	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		20	200.633.000			10	75.000.000
2	18	01	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit		5	164.550.000			3	75.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100	1.343.068.000			100	1.408.700.000
2	18	01	2.082	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	296.368.000			12	302.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	18	01	2.084	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	1.046.700.000			12	1.106.700.000
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%		70	636.223.500			72	540.000.000
						Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%		100				100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	18	01	2.092	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan nya	Unit		16	150.000.000			16	150.000.000
2	18	01	2.099	00	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit		2	185.943.500			2	150.000.000
2	18	01	2.091	00	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit		2	174.690.000			2	150.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi								
2	18	01	2.095	00	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		N/A	0			15	15.000.000
2	18	01	2.096	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		35	125.590.000			25	75.000.000
						Nilai Investasi Daerah	Milyar rupiah		1,453	987.500.000			1,503	1.007.300.000
						Nilai IKM Penanaman Modal	Angka		89,800				90	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kebijakan Penanaman Modal yang telah disusun atau dievaluasi	%		50	100.000.000			50	102.000.000
2	18	02	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal	%		75	50.000.000			75	51.000.000
					Persentase tercapainya kegiatan kemitraan berusaha	%		50				100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	18	02	2.01.01	0	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen		N/A				N/A	
2	18	02	2.01.03	0	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PM DN) dengan UMKM di daerah	Dokumen		2	50.000.000			2	51.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase potensi unggulan daerah yang telah dikaji	%		20	50.000.000			20	51.000.000
2	18	02	2.02	001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		N/A				N/A	
2	18	02	2.02	004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen		1	50.000.000			1	51.000.000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang	%		50	250.000.000			71	255.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						menindaklanjuti								
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon investor yang menyatakan kepedulian investasi (LoI)	Dokumen		6	250.000.000			7	255.000.000
2	18	03	2.01.02	00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen		6	250.000.000			6	255.000.000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase perizinan berusaha dan non berusaha	%		97	224.500.000			99	229.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan								
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan satu pintu yang diterbitkan	%		99	224.500.000			99	229.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	18	04	2.0107	00	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku usaha		2000	20.000.000			2	20.000.000
2	18	04	2.0106	00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan	Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemant	20100	132.000.000			20100	136.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		antuan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha						
2	18	04	2.001	0	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan		Kegiatan usaha		200	52.500.000			200	52.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				08	pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko									
2	18	04	2.0105	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		2	20.000.000			2	20.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Proyek Penanaman Modal yang Memiliki Nilai Investasi dari LKPM yang disetujui	%		23	393.000.000			35	400.900.000
2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha kecil, menengah dan besar berijin yang memperoleh fasilitasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%		21	393.000.000			32	400.900.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	18	05	2.0104	0	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan usaha		10	50.000.000			12	52.000.000
2	18	05	2.0105	0	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis	Pelaku usaha		265	288.000.000			265	292.900.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko								
2	18	05	2.0106	0	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakuka	Kegiatan usaha		30	55.000.000			30	56.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						n Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha								
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi yang ter update secara periodik	%		100	20.000.000			100	20.400.000
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan	%		100	20.000.000			100	20.400.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terintegrasi yang disajikan di website								
2	18	06	2.0102	00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen		5	20.000.000			5	20.400.000

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Di bawah ini ditampilkan matriks renja Tahun 2026 berdasarkan penetapan pagu awal renja Tahun 2026. Rincian renja per program, per kegiatan dan per sub kegiatan beserta kerangka pendanaannya dapat dilihat pada matriks.

Tabel 4. 1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DPMPTSP KAB. BANYUMAS TAHUN 2026

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
2	18				Meningkatnya Nilai Investasi daerah			Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	%	Kab. Banyumas	7,390	9.911.050.000		
					Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah			IKM Mal Pelayanan Publik	Angka		91,820	8.923.550.000		

Kode	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
					Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka		87,550			
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka		4,210			
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka		3,530			
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	96,500	8.923.550.000	DAU- PAD	
				Nilai kematangan organisasi	Angka		43			

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
								Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%		100			
								Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%		60			
2	18	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%		100	20.000.000		

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
								Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%		100			
2	18	01	2.01	0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		5	10.000.000		
2	18	01	2.01	0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		11	10.000.000		

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	18	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		100	5.512.645.000		
								Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%		100			
2	18	01	2.02	0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		58	5.428.365.000		

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
2	18	01	2.02	0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Angka		4	74.280.000		
2	18	01	2.02	0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		5	10.000.000		
2	18	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	%		100	10.000.000		

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
2	18	01	2.05	0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	Dokumen		9	10.000.000		
2	18	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100	1.036.430.500		
								Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka		2			

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
2	18	01	2.06	0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		6	10.000.000		
2	18	01	2.06	0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		4	73.676.500		
2	18	01	2.06	0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4	25.000.000		

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
2	18	01	2.06	0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12	382.754.000		
2	18	01	2.06	0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12	65.000.000		
2	18	01	2.06	0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		100	455.000.000		
2	18	01	2.06	0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		2400	25.000.000		

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
2	18	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%		100	365.183.000		
2	18	01	2.07	0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		20	200.633.000		

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
2	18	01	2.07	0010			Pengadaa n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		5	164.550.000		
2	18	01	2.08				Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		100	1.343.068.000		

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
2	18	01	2.08	0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	296.368.000		
2	18	01	2.08	0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	1.046.700.000		

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
2	18	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%		70	636.223.500		
								Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%		100			

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
2	18	01	2.09	0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		16	150.000.000		
2	18	01	2.09	0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2	185.943.500		

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
2	18	01	2.09	0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		2	174.690.000		
2	18	01	2.09	0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		35	125.590.000		

Kode	Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
					Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Investasi dan Pelayanan Penanaman Modal		Nilai Investasi Daerah	Milyar rupiah		1,453	987.500.000		
				Nilai IKM Penanaman Modal	Angka		89,800			
2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Hasil Pemetaan Potensi Investasi yang dipromosikan	%		100	100.000.000	

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
2	18	02	2.01				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tercapainya kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal	%		75	50.000.000		
								Persentase tercapainya kegiatan kemitraan berusaha	%		50			

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
2	18	02	2.01	0003			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen		2	50.000.000		
2	18	02	2.02				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang dikaji	Dokumen		1	50.000.000		
2	18	02	2.02	0004			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen		1	50.000.000		

Kode				Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang menindaklanjuti	%		50	250.000.000		
2	18	03	2.01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah calon investor yang menyatakan kepeminatan investasi (LoI)	Dokumen		6	250.000.000		

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
2	18	03	2.01	0002			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen		6	250.000.000		
2	18	04					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	%		97	224.500.000		

Kode				Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
2	18	04	2.01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan satu pintu yang diterbitkan	%		99	224.500.000		

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	18	04	2.01	0007			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku usaha		2000	20.000.000		

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	18	04	2.01	0006			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha		20100	132.000.000		

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
2	18	04	2.01	0008			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kot a bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiata n usaha		200	52.500.000		

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
2	18	04	2.01	0005			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		2	20.000.000		
2	18	05					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Proyek Penanaman Modal yang Memiliki Nilai Investasi dari LKPM yang disetujui	%		23	393.000.000		

Kode				Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	18	05	2.01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaku Usaha kecil, menengah dan besar berijin yang memperoleh fasilitasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%		21	393.000.000		

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	18	05	2.01	0004			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan usaha		10	50.000.000		

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	18	05	2.01	0005			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku usaha		265	288.000.000		

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	18	05	2.01	0006			Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan usaha		30	55.000.000		

Kode				Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
								Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi yang ter update secara periodik	%		100	20.000.000		
2	18	06	2.01			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi yang disajikan di website	%		100	20.000.000		

Kode					Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
									Sstuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
2	18	06	2.01	0002			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen		5	20.000.000		

Berdasarkan tabel tersebut terdapat 5 (lima) Program Penanaman Modal yang terdiri dari 6 (enam) Kegiatan Urusan Penanaman Modal dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan. Terdapat 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 9.911.050.000 yang telah melalui analisis kebutuhan pada SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Target dan indikator kinerja yang ada pada tabel berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) 2025-2029 yang telah disusun.

BAB V. PENUTUP

Sebagai dokumen perencanaan, Renja OPD dijadikan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan periode anggaran. Dengan evaluasi tersebut dapat ditentukan strategi untuk pengembangan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Banyumas dimasa yang akan datang.

Renja OPD akan sangat berkaitan dengan anggaran yang dibutuhkan, apabila anggaran tidak tersedia secara maksimal maka perlu analisa lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran, sehingga target kinerja dan standar pelayanan yang ditetapkan dicapai. Analisa yang dibutuhkan terhadap Renja adalah program-program dan aktifitas yang akan mendukung terwujudnya tujuan dari pembangunan daerah, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Keurangan anggaran yang teridentifikasi di Renja Tahun 2026 adalah Gaji untuk PPPK baru yang belum dialokasikan pada pagu anggaran OPD, sehingga diperlukan desk kembali dengan BKAD Kabupaten Banyumas terkait pemenuhan kebutuhan gaji dimaksud. Kekurangan Gaji dan Tunjangan dimaksud sebesar kurang lebih Rp 2 milyar rupiah. Untuk pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarpras serta Pengadaan peralatan dan mesin kantor untuk Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas, apabila tidak terpenuhi usulan anggarannya di Perubahan APBD 2025 maka akan diajukan kembali pada KUA PPAS induk ataupun Perubahan Tahun 2026.

Rancangan Akhir Renja Tahun mengacu pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Banyumas serta Rancangan Renstra DPMPTSP 2025-2029. Dimana ini merupakan periode baru setelah periode RPD Peralihan Kabupaten Banyumas 2024-2026.

Dengan rancangan akhir renja 2026 ini akan menjadi acuan bagi terlaksananya tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, dengan harapan akan mencapai target kinerja penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah ditetapkan.

Purwokerto, 19 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas



KRIS SINTA INDRA KUSUMAWATI, S.STP
Pembina

NIP. 198003151999122001

LAMPIRAN I

REGISTER RISIKO PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	Program/ Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesai an	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Iklim Penanaman Modal														
1	Optimalnya Kajian Potensi Investasi	1	Jumlah potensi investasi Kabupaten/Kota yang dikaji	Rendahnya kualitas peta potensi investasi	Tidak adanya kajian-kajian investasi berupa kajian internal dan kajian akademis	Image/gambar an dan respon terhadap peta potensi investasi dari calon investor kurang bagus	Pelaku Usaha	Melakukan pemetaan kembali terhadap potensi unggulan dan adanya kajian- kajian terhadap potensi unggulan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan kajian peta potensi unggulan berbasis IPRO	Bidang PIPPM	TW III	DPMPTSP
2	Optimalnya Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	2	Persentase tercapainya kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal	Sedikitnya pelaku usaha yang memperoleh Insentif/ke mudah berusaha/k erjasama kemitraan	Pelaku usaha kurang informasi terkait insentif/kem udahan berusaha/ke rjasama kemitraan	Motivasi para pelaku usaha menjadi stagnan untuk kemajuan usaha	Pelaku Usaha	Melakukan Sosialisasi melalui pertemuan ataupun melalui media yang lain	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan pembahasan revisi atas perbup Insentif dan Kemudahan Berusaha, Upaya jemput bola kepada pelaku usaha	Bidang PIPPM, Bidang Pelayanan PM, Sekretariat	TW II, TW III	DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal														

3	Optimalnya Promosi Penanaman Modal di Kabupaten	3	Jumlah calon investor yang menyatakan kepedinan investasi (LoI)	Promosi tidak menghasilkan LoI	Promosi investasi tidak lengkap dan detail dalam menyajikan potensi investasi yang ditawarkan	Kemiripan atas investasi tidak berkembang	Pelaku Usaha	Kualitas promosi ditingkatkan dengan menyajikan hasil-hasil pengkajian investasi	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyajikan promosi pada saluran pameran, forum investasi, one on one meeting, web, media cetak dan media elektronik	Bidang PIPPM	TW III, TW IV	DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal														
4	Optimalnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	4	Persentase Perizinan satu pintu yang diterbitkan	Pemberian gratifikasi dari pemohon pada saat proses pemberian izin	Tekanan eksternal	1. Dampak Reputasi 2. Dampak Hukum 3. Dampak Kinerja 4. Dampak Budaya	OPD, Stakeholder	Kotak makanan, minuman gratifikasi untuk diberikan kepada pengunjung MPP, Laporan UPG	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Kotak makanan, minuman gratifikasi untuk diberikan kepada pengunjung MPP, Laporan UPG	Bidang PM Seko Perencanaan Kesra dan Bidang PM Seko Pembangunan, UPG	TW II	DPMPTSP
Program Pengendalian Penanaman Modal														
5	Optimalnya Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal	5	Persentase Pelaku Usaha kecil, menengah dan besar berijin yang memperoleh fasilitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kurang optimalnya Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran para pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya	Realisasi Investasi Rendah	Pelaku Usaha	Rapat pengawasan perijinan, Bimtek LKPM dan pengawasan rutin insidental kegiatan usaha	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pendampingan Penyelesaian permasalahan kendala realisasi investasi, Bimtek dan bimbingan langsung LKPM, pengawasan rutin dan insidental kegiatan usaha	Bidang Daldatin	TW II dan TW III	DPMPTSP

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal														
6	Optimalnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	6	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi yang disajikan di website	Tidak tersajinya data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi di website	Kurang optimalnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	Data dan informasi kurang dapat diakses oleh masyarakat	OPD, Stakeholder	Melaksanakan penyusunan laporan perizinan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Identifikasi dan pengolahan data sesuai kebutuhan OPD dan menyajikan di website	Bidang Daldatin	TW II dan TW III	DPMPTSP
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
7	Optimalnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Menggunakan uang persediaan untuk kepentingan pribadi	Tekanan ekonomi, peluang berbuat curang, intervensi dari pihak luar, pembenaran	1. Dampak Keuangan 2. Dampak Reputasi 3. Dampak Hukum 4. Dampak Kinerja 5. Dampak Budaya	OPD	Pembatasan uang muka persediaan untuk kegiatan	E	-	-	Sub Keuangan	TW I	DPMPTSP
8	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	Penunjukan penyedia barang/jasa yang tidak sesuai prosedur	Tekanan dari atasan, tekanan dari pihak eksternal, penyalahgunaan wewenang sebagai pelaku PBJ	1. Dampak Reputasi 2. Dampak Hukum 3. Dampak KinOerja 4. Dampak Budaya	OPD	Purchasing menggunakan e-catalog	E	-	Pengadaan menggunakan e-catalog	Umpeg	TW II dan TW III	DPMPTSP